

Judul : Kemenhaj akan buka seleksi petugas haji, perbanyak petugas perempuan
Tanggal : Selasa, 11 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 10

Kemenhaj Akan Buka Seleksi Petugas Haji Perbanyak Petugas Perempuan

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) akan membuka rekrutmen petugas haji 2026. Seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi dan kloter tingkat daerah dimulai bulan November 2025. Sedangkan seleksi PPIH tingkat pusat digelar bulan Desember.

MENANGGAPI itu, anggota Komisi VIII DPR Mahdalena meminta agar kuota petugas haji perempuan pada penyelenggaraan haji 2026 diperbanyak. Sebab jumlah jemaah haji perempuan lebih banyak dibanding laki-laki.

Petugas haji perempuan juga diyakini lebih memahami kebutuhan dari jemaah haji perempuan. "Termasuk memberikan rasa aman dan nyaman selama proses ibadah haji," ujar Mahdalena, dalam keterangannya, Senin (10/11/2025).

Diketahui, berdasarkan data Sistem Informasi dan Komputisasi Haji Terpadu (Siskohat) pada penyelenggaraan haji 2025, dari 203.149 orang jemaah haji reguler sebanyak 55,54 persen atau 112.838 orang merupakan jemaah perempuan. Sementara jemaah laki-laki berjumlah 90.311 orang atau 44,46 persen.

Mahdalena melanjutkan, kehadiran petugas haji perempuan sangat dibutuhkan untuk memberikan pendampingan yang sesuai. Utamanya bagi jemaah lanjut usia atau yang memiliki keterbatasan fisik. "Dominasi jumlah jemaah haji perempuan menandakan, adanya kebutuhan penanganan khusus," jelasnya.

Jemaah haji perempuan tentunya lebih nyaman jika dalam

pelaksanaan ibadah haji dibantu oleh petugas haji perempuan. Dia mencontohkan, jemaah haji perempuan lansia yang membutuhkan bantuan ke kamar mandi atau dalam kondisi tertentu mengharuskan pendampingan. "Dalam situasi seperti ini, keberadaan petugas haji perempuan sangat dibutuhkan," imbuh Anggota Fraksi PKB ini.

Dia menambahkan, petugas haji perempuan rata-rata memiliki ketahanan fisik relatif baik. Apalagi mereka juga biasanya mempunyai ketelatenan lebih untuk melayani para jemaah. "Mereka memiliki komitmen kuat dan saya yakin ketika terpilih, perempuan akan berusaha maksimal dalam memberikan yang terbaik dalam pelayanannya kepada jemaah haji," klaim legislator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.

Anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid mengusulkan penambahan kuota petugas haji musiman dari unsur mahasiswa Indonesia yang belajar di Timur Tengah (Timteng) untuk mendampingi jemaah haji. Alasannya, mereka memiliki kemampuan berbahasa Arab, memahami tata cara berhaji dan budaya Arab Saudi, serta memiliki fisik prima. "Sehingga mereka dapat memberikan pelayanan dan pendampingan



Mahdalena

optimal bagi jemaah haji Indonesia," kata HNW sapaan akrabnya.

Selain karena profesionalitas dan peningkatan kualitas penyelenggaraan haji, pihaknya juga sangat bermanfaat bagi keberlangsungan pendidikan mereka sebagai kader ulama, penerus bangsa. "Ini merupakan aspirasi yang banyak disampaikan kepadanya oleh para mahasiswa Indonesia di Timteng," kata dia.

Anggota Fraksi PKS itu bersyukur karena usulan tersebut akhirnya disetujui dalam rapat kerja antara Komisi VIII DPR bersama Kemenhaj pada Rabu (5/11/2025). Dan ini menjadi kesimpulan rapat yang mengikat untuk dilaksanakan. Kesimpulan tersebut menegaskan Kemenhaj harus meningkatkan rekrutmen petugas dari unsur mahasiswa Indonesia di Timteng.

"Kepada para mahasiswa Timteng yang nantinya menjadi tenaga pendukung haji, agar melaksanakan amanah

ini dengan sebaik-baiknya dan melayani jemaah haji Indonesia sepenuh hati," imbuh dia.

Selain itu, HNW meminta agar persoalan kartu Nusuk yang sempat menyusahkan jemaah haji tahun sebelumnya tidak terulang lagi. Hal ini untuk memastikan peningkatan kualitas layanan dan kemudahan ibadah jemaah haji Indonesia.

Caranya, beber dia, agar kartu Nusuk didistribusikan sedini mungkin, bahkan sejak jemaah berada di embarkasi di Indonesia. Sehingga, mereka dapat menjalankan rangkaian ibadah haji dengan tenang tanpa kendala administrasi seperti tahun sebelumnya.

HNW mengenang pada pelaksanaan haji tahun 2025, banyak jemaah kesulitan masuk ke Mekkah, dan yang sudah berada di Mekkah pun kesulitan masuk ke Masjidil Haram. Hal ini terjadi karena miskomunikasi antara Pemerintah Indonesia dengan Syarikah, sehingga, kartu Nusuk terlambat dibagikan.

"Untuk haji tahun depan, Kemenhaj harus memastikan agar tidak lagi terjadi permasalahan dengan Syarikah (perusahaan pengelola layanan haji) seperti tahun lalu," ucap Hidayat.

Dia bilang, Kemenhaj dan Komisi VIII DPR juga menyepakati dan mengupayakan pembagian kartu Nusuk dilakukan sejak jemaah berada di embarkasi di Indonesia, dan memastikan Syarikah memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji. "Hal ini telah menjadi kepu-

tusan rapat yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh Kemenhaj," ujarnya.

Diketahui, Kartu Nusuk adalah kartu identitas digital wajib bagi jemaah haji yang diterbitkan oleh Pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan Umrah. Kartu ini berisi data pribadi jemaah seperti foto dan nomor visa, serta dilengkapi kode QR yang berfungsi sebagai identitas resmi dan tiket untuk mengakses layanan serta memasuki area-area tertentu di Tanah Suci, seperti Masjidil Haram dan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Sementara, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf berjanji mengupayakan peningkatan jumlah petugas pembimbing ibadah (binbad) haji perempuan dalam penyelenggaraan Haji 2026. Sebab peran pembimbing perempuan menjadi aspek krusial agar setiap jemaah wanita mendapatkan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan ibadah selama di Tanah Suci.

"Ini termasuk aspek kenyamanan dan bimbingan ibadah yang sensitif gender di Tanah Suci," ujar Gus Irfan dalam keterangannya, Senin (10/11/2025).

Gus Irfan mengatakan, kehadiran pembimbing perempuan akan memperkuat aspek perlindungan jemaah wanita, terutama dalam pelayanan di pemondokan, tempat ibadah, serta kegiatan bimbingan rohani yang membutuhkan pendekatan sensitif gender. ■ TF